

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi dan transformasi sosial yang semakin dinamis, dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mencetak peserta didik yang unggul secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter. Pendidikan karakter menjadi fondasi esensial dalam membentuk kepribadian peserta didik agar mampu beradaptasi, beretika, dan berkontribusi positif di tengah perubahan sosial yang kompleks. Tuntutan terhadap penguatan karakter semakin mengemuka seiring dengan berbagai fenomena sosial kontemporer, seperti degradasi moral, lunturnya nilai-nilai kebangsaan, serta meningkatnya perilaku intoleransi di kalangan generasi muda.

Menyadari urgensi tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya pendidikan karakter melalui berbagai regulasi strategis, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Kebijakan ini menekankan perlunya integrasi antara kompetensi akademik dan pembentukan karakter dalam seluruh aktivitas pendidikan. Implementasi PPK tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan, melainkan juga memerlukan dukungan aktif dari Dinas Pendidikan sebagai motor penggerak perubahan di tingkat daerah. Dalam kerangka ini, manajemen perubahan menjadi instrumen kunci untuk memastikan adopsi, internalisasi, dan keberlanjutan inovasi kebijakan pendidikan karakter.

Menurut Nugroho (2020), implementasi merupakan proses penerjemahan keputusan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui program, kegiatan, dan mekanisme kerja yang terstruktur dan adaptif terhadap konteks lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Subarsono (2021) yang menegaskan bahwa implementasi mencakup upaya konkret untuk mengoperasionalkan kebijakan melalui organisasi dan perilaku individu, dengan mempertimbangkan faktor sumber daya, struktur birokrasi, sikap pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, Purwanto dan Sulistyastuti (2021) mendefinisikan manajemen perubahan sebagai proses sistematis dan terencana untuk mengubah struktur, budaya, kebijakan, maupun perilaku organisasi, guna mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif, termasuk dalam sektor pelayanan publik seperti pendidikan. Dalam konteks pendidikan, perubahan manajerial diarahkan untuk membentuk lingkungan sekolah yang kondusif bagi internalisasi nilai-nilai karakter peserta didik (Permendikbud No. 20 Tahun 2018).

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan serangkaian program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai utama karakter melalui pendekatan pembelajaran yang integratif, kolaboratif, dan kontekstual (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Selaras dengan itu, Mulyasa (2021) menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik melalui pembelajaran yang membentuk sikap dan perilaku positif di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, sebagai instansi pembina pendidikan di tingkat daerah, memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi program PPK di wilayahnya. Penguatan pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak dalam membentuk generasi bangsa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen kebangsaan yang kuat. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab.

Namun demikian, implementasi program PPK di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala yang muncul antara lain resistensi terhadap perubahan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah. Kondisi geografis Kabupaten Nias Barat yang

menantang, heterogenitas sosial budaya, dan keterbatasan infrastruktur pendidikan semakin memperkuat kebutuhan akan pendekatan manajemen perubahan yang kontekstual, adaptif, dan partisipatif.

Penguatan pendidikan karakter tidak cukup dilaksanakan melalui instruksi formal, melainkan memerlukan transformasi budaya organisasi baik di tingkat Dinas Pendidikan maupun satuan pendidikan. Perubahan nilai kerja, pola komunikasi, mekanisme kolaborasi, serta pola pikir pendidik dan tenaga kependidikan menjadi aspek-aspek krusial yang harus dikelola secara sistematis melalui tahapan-tahapan manajemen perubahan, mulai dari identifikasi kebutuhan perubahan, perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

Secara umum, karakter peserta didik di wilayah ini masih menunjukkan berbagai persoalan, seperti rendahnya disiplin, kurangnya tanggung jawab terhadap tugas, serta lemahnya sikap saling menghargai dan kepedulian terhadap lingkungan. Masih sering dijumpai perilaku tidak tertib, konflik antarpeserta didik, dan minimnya kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan nilai karakter yang lebih terarah dan sistematis melalui pendekatan manajemen perubahan yang efektif.

Berdasarkan observasi awal, meskipun penguatan pendidikan karakter telah menjadi prioritas nasional, dalam praktiknya implementasi di tingkat satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang mengemuka meliputi belum kondusifnya lingkungan belajar, keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan pendidikan karakter, lemahnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi program. Faktor-faktor ini menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan penguatan pendidikan karakter secara komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian ilmiah dengan mengangkat judul: "Analisis Implementasi Manajemen Perubahan dalam Penguatan Pendidikan Karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat."

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis proses implementasi manajemen perubahan dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, hambatan, serta strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala dalam penerapan program tersebut di satuan pendidikan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen perubahan dalam penguatan pendidikan karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi manajemen perubahan dalam penguatan pendidikan karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi manajemen perubahan dalam penguatan pendidikan karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi manajemen perubahan dalam penguatan pendidikan karakter di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai implementasi manajemen perubahan, khususnya dalam konteks sektor pendidikan di tingkat daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan dalam bidang administrasi publik, khususnya pada implementasi kebijakan pendidikan berbasis karakter di lingkungan birokrasi pendidikan.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan model teoritis baru mengenai bagaimana penguatan pendidikan karakter dapat diinternalisasikan secara efektif melalui pendekatan manajemen perubahan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan empiris yang dapat digunakan dalam perbaikan strategi implementasi manajemen perubahan untuk mendukung efektivitas program Penguatan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan.
2. Menjadi referensi praktis dalam mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif untuk penguatan pendidikan karakter melalui perubahan budaya organisasi sekolah.
3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung perubahan institusional yang mendorong internalisasi nilai-nilai karakter peserta didik.
4. Menjadi landasan bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji implementasi manajemen perubahan dalam konteks pendidikan atau sektor pelayanan publik lainnya, khususnya yang berkaitan dengan penguatan karakter bangsa.